DAKWAH DI TENGAH KEPENTINGAN POLITIK KEKUASAAN

Nurhidayat
UMJ Jakarta
nurhidayat_kd76@yahoo.co.id

Abstrak

Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya untuk menjadi seorang dai. Dai bagi dirinya sendiri juga dai bagi orang lain. Hal ini disebabkan karena di dalam Islam tidak mengenal adanya *hierarki religious*, karena menyebarkan agama bukan milik otoritas kelompok elit atau bangsawan tertentu. Ada hal yang berbeda terkait dakwah di Indonesia, terutama ketika masa pemerintahan Orde Baru yaitu dari tahun 1967 sampai tahun 1998. Pada masa ini dakwah memberikan nuansa lain dalam perjalanan dan perkembangannya. Pemerintah sendiri bersikap ambivalen terhadap dakwah, dimana pemerintah tidak memberikan ruang gerak sedikitpun kepada kegiatan-kegiatan dakwah, karena dakwah telah dianggap sebagai identitas politik atau tujuan berpolitik, yang akan mengancam kekuasaan pemerintah.

Dalam sejarah politik Orde Baru, sangat sering terjadi dakwah dijadikan instrument untuk melanggengkan kekuasaan dengan tujuan untuk menjinakan umat Islam agar tetap tenang, harmonis dan dinamis, sekalipun berbagai tindakan kemungkaran meraja lela, terutama korupsi.

Dalam bahasa Orde Baru sendiri dakwah diartikan sebagai upaya untuk mengubah keadaan masyarakat, melalui pembangunan dan pengembangan terutama sumber daya manusianya. Sejalan dengan konsep dasar tentang dasar tentang dakwah itulah, maka pembangunan dibidang agama ditingkatkan dan lebih ditekankan pada pembangunan sarana-sarana peribadatkan seperti pembangunan masjid, majelis taklim, Islamic center, pondok pesantren dan sebagainya.

Kata Kunci : *Dakwah; Kepentingan; Politik Kekuasaan*

A. Pendahuluan

Dakwah menurut pemahaman Masykuri Abdillah adalah gerakan yang diarahkan untuk mendorong umat Islam untuk memahami ajarannya secara integral (*kaffah*), pemahaman Islam yang totalitas ini menyangkut pemahaman terhadap akidah, syariah (ibadah dan muamalah) dan akhlak ini sangat penting, sebab letak kesempurnaan ajaran Islam tidak hanya ditentukan oleh aspek spiritualitas ubudiyah saja.¹ Akan tetapi ditentukan oleh berbagai aspek, karena itu ajaran Islam sangat komprehensif menyangkut seluruh sendi kehidupan manusia; sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan lain-lain.² Bahkan Harun Nasution dalam buku Islam ditinjau dari bebrbagai aspeknya menambahkan aspek teologi, hukum, mistisisme dan filsafat.³

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang *kaffah* karena berfungsi tidak hanya sebagai agama dan dunia, ibadah dan muamalah, aqidah dan syariah, kebudayaan dan peradaban, agama dan negara. Oleh sebab itu menurutnya Islam bukan hanya sekedar agama, terlebih lagi hanya sekedar identitas, akan tetapi Islam tampil dan berperan sebagai jalan hidup *way of life*.⁴ Dakwah harus diarahkan untuk menjadikan agama Islam tidak sekedar identitas dan formalitas. Kondisi ini masih menjadi persoalan umat, agama hanya sebagai identitas dan formalitas saja, belum dipahami semagai *way of life* jalan hidup sehingga umat masih unggul dalam hal kuantitas, belum secara kualitas.

¹Spiritual ubudiyah terdiri dari dua kata spiritual artinya sesuatu yang mencakup nilai-nilai kemanusiaan yang non-material, seperti: kebenaran, kebaikan, keindahan, kesucian, dan cinta, rohani, kejiwaan, intelektual. Ubudiyah artinya hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah ibadah kepada Allah Swt, pengabdian, peribadatan kepada Allah Swt. Lihat Kamus Ilmiah Populer, *Tim Prima Pena* (Surabaya : Gitamedia Press, 2006), 445 dan 487

² Umer Chapra, *The Future of Economics an Islamic Persfective*, Islamic Foundation, 2014.

³ Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terjemahan : *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami* (Jakarta : Robbani Press, 2001),.17

Inilah mengapa menurut Jumu'ah Amin Abdul Aziz makna dakwah secara bahasa itu berasal dari kata *an-nida* artinya memanggil, *da'afulana ilaa fulanah* si fulan mengundang si fulan. *ad-du'a ila sya'i* menyeru dan mendorong kepada sesuatu, *ad-dakwah ila qadhiyah*, menegaskannya atau membelanya, baik terhadap yang hak ataupun yang *bathil*, yang positif maupun yang negatif. Jadi secara etimologi menurut Jumu'ah dakwah itu adalah ajakan, dan ajakan itu ada dua macam ada ajakan kepada kebaikan ada juga ajakan kepada kesesatan.

Hal ini Jumu'ah merujuk kepada sebuah hadis Rasulullah bersabda: "*Barang siapa yang mengajak pada petunjuk, maka ia berhak mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan maka ia berhak mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun*". (HR. Muslim).⁵

Walaupun demikian dakwah yang benar, diinginkan dan sesuai dengan ajaran agama adalah dakwah yang mengajak atau berorientasi kepada kepabaihan. Dakwah yang dilakukan dalam rangka memelihara agama (*hifdzu din*).

B. Islam Agama Dakwah

Islam menuntut umatnya untuk menjadi seorang dai, baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Dalam Islam tidak ada *hierarki religious*, ajaran Islam setiap individu harus memiliki tanggung jawab (*responsibility*) terhadap perbuatannya terhadap Allah. Oleh sebab itu karena ajaran Islam mempunyai sifat universal yang di tujukan kepada seluruh manusia. Oleh karenanya kaum muslimin memiliki kewajiban untuk menyebarkan dan mensosialisasikan ajaran-ajaran Islam kepada seluruh manusia, tanpa mengenal dimensi ruang dan waktu. Tindakan menyebarkan dan mensosialisasikan ajaran-ajaran itu dalam bahasa agama adalah merupakan substansi dari dakwah.

⁵ Jumu'ah Amin Abdul Aziz, *Fiqh Dakwah, Studi atas Berbagai Prinsip dan Kaidah yang Harus dijadikan Acuan dalam Dakwah Islam (terjemah) judul aslinya : ad-Da 'wah Qawaid wa Ushul* (Solo: PT. Intermedia, 1997), 29.

Dalam pemahaman Alwi Shihab dakwah adalah suatu hal yang berkaitan dengan teknis yang pada dasarnya dipahami sebagai upaya untuk menghimbau atau mengajak orang lain kepada ajaran Islam, dengan berbagai metode dan cara yang diajarkan oleh al-Qur'an. Diantara dengan cara bijaksana (*hikmah*), nasehat yang baik (*al-mauw'idhatul hasanah*) dan perkataan yang baik (*al-mauwidzah hasanah*).⁶

Dengan metode atau cara demikian maka dakwah yang dilakukan akan menyentuh kepada esensinya yaitu mengajak atau menyeru manusia dari yang yang tidak baik menjadi perubahan (*mina adjulumati Ila annur*) ini menunjukkan bahwa dakwah dapat dilihat didalamnya terdapat ide atau gagasan progresivitas (kemajuan), idea tau gagasan semacam ini menurut Nurcholis Madjid adalah sebagai proses yang simultan menuju kepada yang baik dan lebih baik dalam mewujudkan dakwah itu sendiri.⁷

Oleh karena itu dakwah yang diinginkan seperti di atas maka harus ada menurut Jum'ah Amin Abdul Aziz, adalah dakwah yang berorientasi kepada pembangunan masyarakat Islam. Perbaikan masyarakat dari beberapa penyimpangan dan kemungkaran-kemungkaran, memelihara keberlangsungan dikalangan masyarakat Islam yang telah berpegang pada kebenaran dengan cara pengajaran, pengingatan, pensucian jiwa, dan pendidikan.⁸

Perjalan dakwah itu sendiri dimulai sejak Nabi Adam As dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad Saw, kemudian setelah melalui proses yang sangat panjang dakwahpun sampai ke Indonesia, lalu perkembangan dakwah itu sendiri dari zaman ke zaman selalu mengalami transformasi baik metode maupun aplikasinya di masyarakat, sehingga dakwah dari zaman ke zaman memperlihatkan tipikalnya.

⁶ Alwi Shihab, *Islam Inklusif* (Bandung: Mizan, 1998), 252.

⁷ Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat* (Jakarta: Paramadina, 1999), 97.

⁸ Jumu'ah Amin Abdul Aziz, *Fiqh Dakwah, Studi atas Berbagai Prinsip dan Kaidah yang Harus dijadikan Acuan dalam Dakwah Islam (terjemah) judul aslinya : ad-Da'wah Qawaid wa Ushul* (Solo: PT. Intermedia, 1997), 32.

Dalam konteks Indonesia, perjalanan dakwah dimulai seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia yaitu pada abad ke-VIII dan pada akhirnya dakwah mulai berkembang di seluruh kepulauan Indonesia, seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku dan kepulauan-kepulauan lainnya. Perkembangan Islam itu sendiri tidak terlepas dari peran aktif para da'i yang selalu melakukan aktivitas dakwahnya.

Ada hal yang berbeda ketika menelusuri secara concern dakwah di Indonesia, terutama ketika masa pemerintahan Orde Baru yaitu dari tahun 1967 sampai tahun 1998. Pada masa ini dakwah memberikan nuansa lain dalam perjalanan dan perkembangannya. Pemerintah sendiri bersikap ambivalen terhadap dakwah, disatu sisi pemerintah tidak memberikan ruang gerak sedikitpun kepada kegiatan-kegiatan dakwah, karena dakwah telah dianggap dijadikan sebagai identitas politik atau tujuan berpolitik, yang akan mengancam kekuasaan pemerintah.

Disisi lain pemerintah Orde Baru dengan kebijakan developmentalismenya, membawa kepada kevakuman berpolitik kaum Muslim. Karenanya konsekuensi logisnya dakwah selalu dicap sebagai gerakan “ekstrim kanan” dan istilah ini menurut Muhajir sama dengan penggunaan istilah ekstrim kiri yang ditudingkan kepada ideologi komunis dan sosialis. Para da'i pada masa ini mengalami alienasi politik, tidak jarang mereka selalu diawasi serta diinterpendensi oleh penguasa.⁹

Dalam sejarah politik Orde Baru, sangat sering terjadi dakwah dijadikan instrumen untuk melanggengkan kekuasaan, dan lebih mengherankan lagi banyak oleh rezim Soeharto, dengan tujuan untuk menjinakan umat Islam agar tetap tenang, harmonis dan dinamis, sekalipun berbagai tindakan kemungkaran meraja lela, terutama korupsi.¹⁰

Akan tetapi perlu juga diakui oleh umat Islam disisi lain pemerintah Orde Baru juga memberikan kontribusi dalam kemajuan dan perkembangan dakwah. Hal ini ditandai dengan muncul dan merebaknya fenomena seperti kegiatan-kegiatan dakwah mulai dari lapisan paling bawah (*grass root*) sampai lapisan atas seperti di hotel-hotel dan tempat industri.¹¹

⁹ Azyumardi Azra, *Agama Rakyat Agama Penguasa* (Yogyakarta: Galangpress, t.t).

¹⁰ Azyumardi Azra, *Agama Rakyat Agama Penguasa* (Yogyakarta: Galangpress, t.t).

¹¹ M. Dawam Raharjo, *Intelektual, Intelegensi dan Perilaku Politik Bangsa* (Bandung: Mizan 1996), 158.

Seiring dengan perubahan zaman dan semangat developmentalismenya Orde Baru dakwahpun menurut M. Dawam Raharjo, telah mengalami perubahan makna yang tadinya dakwah hanya diartikan secara praktis sama dengan tabligh yaitu penyampaian ajaran Islam secara lisan, misalnya dalam ceramah-ceramah. Kini telah mengalami transformasi yaitu dakwah melalui alat-alat komunikasi, audio-visual, dan lewat tulisan-tulisan, seperti media cetak.

Dalam kondisi kebijakan politik Orde Baru yang tidak memberikan peluang Islam politik maka pada masa ini terjadi reorientasi para aktivis dakwah (*da'i*) reorientasi ini secara sederhana meminjam istilah Azyumardi Azra dari "Islam politik" menuju "Islam kultural".¹² Sebagaimana kita tahu aktivis Islam di Indonesia dari zaman kemerdekaan sampai akhir tahun 1970-an berorientasi politik.

Tetapi pada pemerintahan Orde Baru melalui kebijakan depolitisasi dalam berbagai bentuk misalnya partai-partai Islam kedalam PPP sampai puncaknya pada penetapan asas tunggal Pancasila (1985), sehingga menyebabkan para aktivis muslim (*da'i*) secara terpaksa meninggalkan orientasi politik dan beralih ke-orientasi dakwah.

Pada masa Orde Baru ini mendapat tempat dimasyarakat, hal ini dibuktikan dengan munculnya fenomena baru yaitu berdirinya sarana-sarana untuk berdakwah, seperti di kantor-kantor, di kampus-kampus, di hotel-hotel, dan sebagainya. Bahkan Soeharto penguasa Orde Baru itu memiliki Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila yang telah membangun banyak masjid di berbagai daerah di Indonesia, dan ini secara tidak langsung respon positif terhadap aktivitas dakwah.

Dalam bahasa Orde Baru sendiri dakwah diartikan sebagai upaya untuk mengubah keadaan masyarakat, melalui pembangunan dan pengembangan terutama sumber daya manusianya. Sejalan dengan konsep dasar tentang dasar tentang dakwah itulah, maka pembangunan dibidang agama ditingkatkan dan lebih ditekankan pada pembangunan sarana-sarana peribadatkan seperti pembangunan masjid, majlis taklim, Islamic center, pondok pesantren dan sebagainya.¹³

¹² Azyumardi Azra, *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan* (Jakarta: PT. Rajawali Press 1999), 31.

¹³ M. Dawam Raharjo, *Intelektual, Intelegensi dan Perilaku Politik Bangsa* (Bandung: Mizan 1996), 159

Pondok pesantren sebagai lembaga yang notabene pencetak kader dakwah pada masa ini sesuai dengan developmentalisme pemerintah Orde Baru di jelaskan Nurcholis Madjid telah mengalami refungsionalisasi dari fungsi-fungsi tradisional yakni (*trasmisi* dan *transfer* ilmu-ilmu Islam, pemeliharaan tradisi Islam dan reproduksi ulama), menjadi alternatif pembangunan yang berpusat pada masyarakat (*people-centered development*) sekaligus sebagai pusat pengembangan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented development*).¹⁴

C. Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Dakwah Islam

Pertama-tama perlu dipahami bahwa dalam konteks budaya Indonesia, pernah mengalami apa yang dinamakan dualisme kebudayaan, yaitu budaya keratin dan budaya populer. Kedua jenis kebudayaan ini sering dikategorikan dalam kebudayaan tradisional. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana budaya lokal berpengaruh terhadap dakwah begitupun sebaliknya, yang lebih mempresentasikan dalam hal ini adalah budaya Jawa, sebab budaya ini dikenal unik, dan kuat, serta ke-elastisan-nya. Kebudayaan Jawa yang dikenal sebagai kebudayaan yang *shopisticated* (bersifat sofististik) sangat kuat, begitu kuatnya kebudayaan Jawa, ia mampu menghadapi setiap budaya dan agama yang datang dari luar.

Ketika Hindu datang, ia diterima tetapi kemudian di Jawa kannya, jadilah jwanisasi Hindu, lalu Budha datang dan di jawakannya pula, jadilah jwanisasi Budha, begitu juga ketika dakwah Islam menyentuh Jawa kemudian terjadi proses Islamisasi, Islampun di Jawakannya, itulah mungkin kenapa budaya Jawa sangat *relativistic* dan *sinkretik*, ada elemen animisme, dinamisme, Hindu dan Budha.

Proses akulturasi dakwah Islam di Indonesia telah melewati jalan yang panjang, unsur-unsur dakwah Islam menjadi bagian yang tidak terasa asing, Islam telah mempribumi. Bagi orang melayu budaya adalah Islam. Buya Hamka pernah mengatakan bahwa kata “minang“ atau Minangkabau adalah Islam sehingga kalau dilepaskan dari Minangkabau yang ada adalah kabau (kerbau).

¹⁴ Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 5.

Bagi orang sunda yang keluar dari agama Islam akan berakibat orang itu tidak diakui sebagai orang sunda lagi. Hal yang sama juga berlaku bagi orang Bugis, Banjar, dan suku-suku lain di Indonesia. Pada suku Jawa pribumisasi Islam terjadi dalam perpaduan unsur-unsur Budaya Jawa dan Islam, begitu adanya percampuran itu sehingga kaum modernis menyebutnya sangat *sinkretisme*.¹⁵

Polemik antara Jawanisasi Islam atau Islamisasi Jawa ini sampai sekarang masih intens, para orientalis atau Indonesianis seminal Zoet Molder yang dikutip Nurcholis Madjid berasumsi bahwa ajaran-ajaran kejawen sebagai "hinduisme berjubah Islam" artinya pengaruh Islam dalam *mistikisme* Jawa hanyalah pada konteks luarnya saja adapun substansinya adalah *hinduisme*, *animisme*, *dinamisme*, dan lain lain yang berkolaborasi secara *sinkretik*. Islam yang menyebar di Indonesia memang agama yang telah dipengaruhi oleh ajaran mistik, yakni Islam beraliran *sufisme*. Maka Islam yang diajarkan telah dimistikan sehingga ajarannya sejajar dengan religi asli *animisme* dan *dinamisme*.¹⁶

Akan tetapi Simuh menyebutnya sebagai *mistikisme* Islam kejawen, artinya betapapun Jawanya tetapi itu bersumber pada ajaran-ajaran *tasawuf* atau *sufisme* Islam. Islam yang datang dan menyebar di Indonesia memang agama yang telah dipengaruhi ajaran mistik, yakni Islam beraliran *sufisme*. Maka Islam yang diajarkan telah dimistikan sehingga ajarannya sejajar dengan religi asli *animisme*, *dinamisme*.

Senada dengan itu, Ong Hok Tam seorang budayawan berpendapat bahwa pengaruh budaya lokal utamanya Jawa terhadap dakwah Islam itu bisa dilihat dari dominannya penggunaan pendekatan *sufisme* yang menekankan *sufistik*. Penyebaran Islam melalui cara ini lebih efektif dibandingkan dengan penyebaran Islam melalui hukum-hukum Islam yang legal.

¹⁵ Jalaludin Rahmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Cendekiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1998), 120.

¹⁶ Nurcholish Madjid, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern* (Jakarta: Paramadina, 1997), 45.

Ekspresi-ekspresi ritual dalam budaya populer Indonesia juga sering menunjukkan pengaruh Islam yang kuat, sebagai contoh upacara pangawihan di Jawa dapat menunjukkan hal itu, semua ritual tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kehidupan manusia bersifat mulia. Konsep mengenai kemuliaan hidup manusia jelas-jelas diwarnai oleh kultur Islam yang memandang manusia sebagai makhluk yang mulia.

Dalam upacara-upacara sosial budaya populer juga sangat berpengaruh terhadap dakwah, contohnya di Sumatera terdapat upacara “tabut“ untuk memperingati mauled (kelahiran) Nabi, begitupun di Jawa dengan “seketan“ di Sunda “muludan“.

Islam mistik yang dimaksud di atas antara lain adalah adat istiadat, tradisi, dan berbagai kepercayaan lain, sebagai buktinya adalah peninggalan-peninggalan fisik berupa candi-candi, makam para wali, cerita wayang dan naskah-naskah Jawa lainnya.

Pengaruh budaya lokal terhadap dakwah Islam juga akan terlihat pada tempat peribadatan (*masjid*), dilihat dari sudut arsitektur, masjid-masjid yang ada di Indonesia menunjukan tipikalnya sehingga ini yang membedakan dengan arsitektur masjid-masjid di negeri Islam lainnya. Kekhasan gaya arsitektur itu antara lain terlihat pada mesjid tua dan bersejarah, seperti masjid Agung Banten, Masjid Bait ar-Rahman, masjid Demak dan masjid Ternate dan lain-lain.

Menurut G.F. Pijper yang dikutip Uka Tjandrasasmita, menurutnya masjid bergaya atap bertingkat yang banyak terdapat di Indonesia merupakan pengaruh langsung dari budaya lokal yang merupakan tradisi seni bangunan candi yang telah dikenal pada zaman Indonesia-Hindu. Selain itu perayaan-perayaan perkawinan, khitanan, maulidan, rajaban (*isra' mi'raj*) ini merupakan hasil dari asimilasi budaya lokal dengan dakwah Islam.¹⁷

Itulah yang membedakan Islam dengan agama-agama lain, Islam masuk ke Indonesia dengan cara elastik, Islam tidak membawa atau memindahkan simbol-simbol Islam Timur Tengah, ini juga suatu bukti bahwa Islam sangat toleran terhadap budaya lokal, semua unsur budaya lokal disesuaikan didalam Islam.

¹⁷ Uka Tjandrasasmita, *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-kota Muslim di Indonesia dari Abad XII sampai XVIII Masehi* (Kudus: PT. Menara Kusud, 2000), 163.

Fakta ini membuktikan Islam tidak anti budaya, dengan kata lain dakwah Islam di Indonesia mengalami proses “Indonesiasi“, berbeda dengan Hindu atau Budha masuk Islam ke Indonesia membawa stupa, Kristen membangun gereja disini dengan arsitektur Barat. Dari segi ajaran, Islampun tidak pernah sepenuhnya mengalami Jawanisasi, bahkan sekarang sisa-sisa agama jawa sudah sangat sedikit ditemukannya di dalam struktur ajaran Islam di Jawa.

Itu sebabnya Islam Indonesia itu unik, karena Islam telah mempertahankan aspek-aspek budaya dan agama (kepercayaan) pra-Islam, Islam Indonesia adalah merupakan suatu model perpaduan antara aturan sosial, tradisi, adat istiadat dan ritual-ritual lokal. Ini sepadan dengan zaman Nabi, ketika Nabi Mendakwahkan agama Islam Nabi tidak menghancurkan budaya jahiliah, melainkan Islam disesuaikan dengan budaya yang telah ada.

Salah satu ciri Islam Indonesia terutama Islam Jawa yang mencolok adalah pertama kecepatan dan kedalamannya mempenetrasi masyarakat yang beraliran *animisme*, *dinamisme*, dan Hindu-Budha, yang kedua adalah masyarakat Islam Indonesia dipengaruhi oleh ajaran-ajaran metafisik dan sufi, dan yang ketiga adalah Islam Indonesia menyerap *spectrum* kepercayaan yang luas, oleh karena itu semua sulit untuk membedakan mana ajaran agama dan mana tradisi atau adat istiadat lokal.

Oleh sebab itulah dakwah mengajarkan untuk bersikap bijaksana (*bilhikmah*), harus fleksibel, dan harus beradaptasi dengan situasi serta kondisi masyarakat lokal. Ketika dakwah dihadapkan pada masyarakat yang *feudal-agraris*, maka dakwahpun beradaptasi dengan lingkungan itu, begitupun dakwah ketika harus berhadapan dengan kolonial, maka dakwah berorientasi bagaimana membawa umat melawan penjajah, begitupun ketika dakwah harus dihadapan pada kondisi yang modernis, industrialisasi, dan era komunikasi dakwahpun harus mengkondisikan diri dengan itu. Itulah yang menyebabkan mengapa dakwah sampai sekarang masih *survive*.

D. Sejarah Lahirnya Orde Baru dan Hakikat Orde Baru

Kelahiran Orde Baru dilatarbelakangi oleh reaksi sekaligus jawaban atas pemerintah Orde Baru, yang otoriter, diktator dan dipengaruhi oleh tradisi mistik Jawa, serta budaya Feodal, Orde Lama dengan sistem demokrasi terpimpinnya telah begitu banyak mengakomodasi kekuatan komunis, yang nyata-nyata dibenci dan dimusuhi bangsa Indonesia, masa akhir pemerintahan Orde Lama ini berada di persimpangan jalan; demokrasi terpimpin sebagai suatu sistem politik yang bersifat eksperimen itu telah menimbulkan krisis ekonomi dan menjadi penyebab instabilitas nasional.

Pemerintah Orde Lama pada dasarnya memiliki ideologi “*divide et impera*” walaupun secara resmi asas NASAKOM-lah yang banyak dianut. Kebijakan itu tidak memberikan harapan atau suatu penyelesaian bagi masa depan bangsa Indonesia. Menurut Nixon mantan presiden Amerika Serikat yang dikutip Tohir, menurutnya Soekarno sebagai kepala pemerintah hanya dinilai positif dalam membebaskan kekuasaan kolonial, lebih dari itu kekuasaannya adalah sebuah bencana bagi rakyat Indonesia, karena ia telah mengantarkan negeri ini kepada kehancuran ekonomi sebagai akibat dari pengeluaran yang besar dan akumulasi hutang asing membengkak.¹⁸

Hingga pada akhirnya Indonesia nyaris mengalami kebangkrutan terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Namun kritikan Nixon itu tidak semuanya benar, karena disadari membangun suatu negara yang baru keluar dari cengkraman penjajah tidak semudah yang dibayangkan, apalagi secara geopolitik Indonesia terdiri dari Negara kepulauan. Ini terbukti Soekarno telah menepis anggapan itu, sebab dimasa pemerintahannya ia banyak memiliki jasa bagi bangsa Indonesia khususnya umat Islam.

Adapun salah satu penyebab kegagalan Soekarno adalah ia tidak memusatkan perhatiannya pada pembangunan ia hanya berkonsentrasi dalam pembenahan sistem pemerintahan, yang kedua ia sebagai presiden memberikan kelonggaran kepada kalangan komunis untuk mengkonsolidasikan posisi politik mereka, sehingga PKI mengincar beberapa kekuasaan atas nama korporasi yang telah dinasionalisasikan pada tahun 1957 dan 1958.

¹⁸ Tohir Luth, *M. Natsir: Dakwah dan Pemikirannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 140.

Mereka juga telah mengecewakan pihak militer lantaran hubungannya dengan pendukung utamanya yakni Amerika Serikat.

Patut dicatat disini adalah partai komunis telah berhasil menetapkan sebuah undang-undang reformasi tanah pada tahun 1963, kemudian berusaha mengambil alih sejumlah perkebunan para tuan tanah yang sebagian besar dimiliki oleh warga PNI, dan NU, bahkan komunispun membangkitkan sebuah persekutuan antara partai konservatif Muslim. Kemudian pada tahun 1964 dan 1965 terjadi pemberontakan langsung antara komunis dengan kelompok pemuda Muslim. Dan ini berbuntut pada pemberontakan pada tahun 1965 dengan dalih perebutan kekuasaan, pemberontakan yang mereka lakukan telah memicu perang sipil di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan ini memakan banyak korban dari pihak komunis mereka terbunuh dalam jumlah besar.¹⁹

Akhirnya pada tahun 1965 tepatnya tanggal 30 September terjadi suatu prahara yang mengesankan, yaitu terjadinya penculikan sejumlah Jendral yang kemudian dilakukan pembunuhan 1 Oktober di Lubang Buaya Jakarta Timur. Aksi ini dikomandoi oleh Kolonel Untung Komandan pasukan pengawal Istana Jakarta.

Dengan dalih para Jendral dituduh sebagai anggota “Dewan Jendral“ yang sedang mempersiapkan kudeta. Gerakan 30 September di umumkan sebagai gerakan untuk mencegah terjadinya kudeta, maka pagi harinya PKI menyiarkan terbentuknya suatu “Dewan Resolusi“ yang akan mengamankan Negara dan hidupnya Presiden. Peristiwa penghianatan G 30 S/PKI akhirnya bermuara kepada lahirnya Orde Baru.

Bersama dengan itu PKI beserta ormas-ormasnya dengan ideologi *marxisme/leninisme/komunisme* dilarang di Indonesia. Kemudian setelah itu disusul oleh kejatuhan Soekarno dari tampuk kekuasaannya. Partai-partai yang masih ada mengalami demoralisasi karena kepercayaan rakyat kepada mereka merosot jauh. Mereka makin jauh tersudut kepinggir lingkaran kekuasaan, mahasiswa, pemuda, cendekiawan, golongan agama, dan beberapa elemen lainnya termasuk militer mempunyai peran penting dalam kelahiran Orde Baru.²⁰

¹⁹ Al-Chaidar, *Reformasi Prematur* (Jakarta: PT. Darul Falah, 1998), 27.

²⁰ Al-Chaidar, *Reformasi Prematur* (Jakarta: PT. Darul Falah, 1998), 27.

Orde Baru pun tampil ke panggung politik karena dukungan dan desakan dari beberapa aksi pemuda dan mahasiswa, diantaranya adalah KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia) mereka semua *nota bene*-nya adalah mayoritas Muslim. Sejak awal tahun 1966 itulah aliansi pemuda dan mahasiswa serta beberapa ormas lainnya melakukan demonstrasi, memprotes segala bentuk penyalahgunaan bentuk kekuasaan, pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, yang kemudian bermuara pada tuntutan penggantian presiden.

Barulah tanggal 11 Maret 1966 presiden Soekarno mengeluarkan sebuah surat yang dikenal dengan surat perintah sebelas maret (*supersemar*) yang isinya memerintahkan kepada Soeharto untuk mengambil alih segala tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan Soekarno dan stabilitas bangsa. Surat perintah sebelas maret pun sampai sekarang masih diperdebatkan apakah surat itu bersifat sementara atau pelimpahan secara penuh.

Setahun kemudian pada tanggal 12 Maret 1967 Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden sementara, kemudian selang setahun setelah itu tepatnya pada tanggal 27 Maret 1968 ia resmi menjadi presiden kedua setelah Soekarno. Inilah tonggak sejarah atau latar belakang dari kelahiran Orde Baru, yang sangat fenomenal dan penuh bermuatan politis dari pemerintah Orde Baru. Itu sendiri baru dikukuhkan dalam sebuah sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang berlangsung di bulan Juni sampai Juli 1966.

Orde Baru menurut Mulkham adalah suatu era atau periode dari kepemimpinan nasional yang ditandai dengan terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret (*supersemar*) 1966 dari presiden Soekarno kepada Soeharto. Orde Baru inipun dikonsepsikan sebagai koreksi total terhadap sistem pemerintah Orde Lama, indikasinya adalah adanya suatu integrasi antara umat Islam, pemerintah, ABRI dan beberapa kekuatan lainnya dalam menumpas PKI, 30 September 1965 atau yang dikenal dengan istilah Gestapu.²¹

²¹Abdul Munir Mulkhan, *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987* (Jakarta: Rajawali Press, 1989), 32.

Dalam menginterpretasikan atau memaknai Orde Baru banyak sekali pendapat atau teori mengenai hal itu, dengan berbagai variable dan ciri-cirinya, akan tetapi kita bisa melihat Orde Baru ini minimal dari tiga sudut pandang, dari segi kekuasaan, politik, dan karakteristik Orde Baru.

Para pengamat asing (*Indonesianis*) seperti R. William Liddle yang dikutip Eep Saefullah melihat dan mengartikan Orde Baru sebagai suatu model kekuasaan personal, dalam hal ini Soeharto yang menjadi faktor penentu (determinannya), dengan kemampuan politiknya yang luar biasa.

Dalam pemahaman Liddle Orde Baru merupakan suatu model yang khas dengan berbagai ciri yakin : memahami Orde Baru hanya bisa dilakukan dengan melacak *ideology developmentalisme* yang di kembangkan dan dijadikan perlengkapan kekuasaan yang utama dan efektif untuk menciptakan stabilitas politik guna mengamankan proyek-proyek ekonomi liberal dan pragmatis.²² Memahami peran politik militer yang luas telah dijalankan sejak awal untuk mengawal *developmentalisme*. Memahami tercapainya sukses ekonomi yang berimplikasi relatif terbentuknya keabsahan-pragmatis bagi langkah-langkah politik rezim, memahami kapabilitas Soeharto dalam manajemen politik. Kenyataan-kenyataan itu dapat dipahami karena beberapa argument.

Pertama, keterlibatan para teknokrat dari universitas Indonesia yang oleh sebagian orang di respon secara sinis sebagai “mafia Berkley“ (istilah ini diberikan kepada para alumni Universitas Indonesia lulusan University of Berkley) memberikan sentuhan khas kepada Orde Baru. Bentuk konkritnya adalah orientasi Pemerintah Orde Baru pada pembangunan ekonomi dengan pemacu pertumbuhannya, sehingga dengan begitu diharapkan diikuti oleh demokratisasi dibelakang sukses pembangunan dan pertumbuhan.

²² Eep Saefullah Fatah, *Zaman Kesempatan: Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru* (Bandung: Mizan, 2000), 189.

Kedua, sebagaimana yang di ungkapkan Eep Orde Baru yang ditopang oleh kekuatan militer sangat trauma terhadap disentergrasi bangsa dan stabilitas politik ekonomi, terutama kejadian-kejadian yang terjadi pada awal pemerintahan Orde Baru seperti G 30 S/PKI. Dalam kerangka itu, stabilitas politik dan minimalisasi konflik politik adalah wujud sekaligus konsekuensi logis terhadap adanya trauma rezim Orde Baru itu. Bahkan minimalisasi konflik menjadi barometer sukses tidaknya roda pemerintahan dalam pembangunan.

Ketiga, presiden Soeharto, pertama menjadi presiden, menjalankan pemerintahannya memakai model kepemimpinan dengan model kepemimpinan itu merupakan hasil dari penjumlahan dari cara berpikirnya yang sangat Jawa, kapabilitasnya yang tak terbantahkan sebagai seorang militer yang cakap dan kaya pengalaman lapangannya, kecanggihannya sebagai aktor politik dalam melakukan manajemen kekuasaan. Hasilnya menjadi sebuah indikasi kebijakan Orde Baru yang Khas, yaitu mementingkan harmonis dan consensus, menetapkan prioritas, dan target-target politik secara ketat.

Keempat, Orde Baru adalah pemerintahan yang mempunyai hipotesa bahwa polarisasi dan konflik telah menghancurkan sistem politik Indonesia dimasa lalu diantaranya adalah konflik agama, kesukuan, dan konflik kelas.²³

Sementara untuk meredam konflik dan stabilitas sosial politik, Pemerintah Orde Baru memakai system kekuasaan Jawa, sistem ini menurut Fachri Ali suatu sistem kekuasaan alternatif yang relatif lebih cocok dibanding dengan sistem lainnya. Karena Soeharto dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan budaya Jawa, ia menggali filsafat kepemimpinannya dari budayanya sendiri “*mikul dhulur mendhem jero*”.²⁴

Keunggulan sistem kekuasaan Jawa yang dianggap telah mampu menjawab realitas dan karakter kekuasaan Indonesia, karena ia mempunyai kerangka pandangan empiris mengenai sistem pengelolaan kekuasaan. Dibandingkan dengan sistem kekuasaan Barat yang pernah diterapkan sebelumnya, pola perkembangan sistem ini berjalan lancar dan mantap serta dinamis.

²³ Eep Saefullah Fatah, *Zaman Kesempatan: Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru* (Bandung: Mizan, 2000), 193.

²⁴ Artinya mengangkat martabat orangtua dan keluarga lebih penting, lihat dalam buku Fachry Ali, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 373.

Padahal dalam waktu yang lebih lama karena itu seharusnya lebih mantap dari sistem kekuasaan Barat yang telah mengalami dua kali dan gagal, dari demokrasi terpimpin.

Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa seandainya setelah Orde Baru yang dipakai bukan sistem kekuasaan Jawa maka dikhawatirkan yang muncul adalah dominasi konflik dan politik akan berkepanjangan, sebab sistem-sistem kekuasaan lain belum mempunyai kerangka empiris dalam menangani tantangan realitas kekuasaan yang terpencar-pencar.

Singkatnya menurut Fachri Ali, sistem kekuasaan Orde Baru adalah sistem kekuasaan Jawa, suatu sistem yang diadopsi dari epos Hindu India Mahabarata, yang menjunjung tinggi terkoordinasinya manusia dengan alam sekitarnya. Dalam pengertian simbolis, kasatuan dan koordinasi ini dipahami sebagai hubungan harmonis antara jagad gede (tata kosmos) dan jagad cilik (manusia). Sistem ini juga berimplikasi pada sistem politik Orde Baru, sehingga politik Orde Baru merupakan reaksi kemenangan kebudayaan Jawa dari Islam atau dengan kata lain kemenangan kaum priyayi dan abangan dari kaum santri.²⁵

Dari sisi politik, pemerintah Orde Baru memakai politik modernisasi yang dijadikan titik tolak dan kerangka landasan pembangunan bangsa. Modernisasi ini merupakan satu-satunya alternatif dalam memajukan bangsa Indonesia setelah pemerintahan rezim lama sebelumnya (Orde Lama), yang dianggap telah gagal memenuhi tuntutan rakyat. Dengan kebijakan seperti ini diharapkan akan memperoleh legitimasi politik dari rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial-ekonomi dengan kata lain politik Orde Baru ini dalam istilah Liddle adalah politik beras atau logistik, dengan titik tekannya Trilogi Pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Akan tetapi pada sisi lain dengan kebijakan pembangunan ini telah menumbuhkan suburkan kelas pemilik modal birokratik.

²⁵ Fachry Ali, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 376.

Disinilah Orde Baru memformat politik yang dikenal sangat elastis dan monolitik, tidak memberikan peluang dan partisipasi masyarakat. Masyarakat harus “*nrimo ing pandum*” (menerima apa yang menjadi bagian atau hak milik kita) dari apa yang diberikan oleh birokrasi yang terkendali secara sentralistik. Format politik seperti itulah yang menekankan pentingnya stabilitas politik. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Saeful Mujani, menurutnya ini sudah menjadi asumsi umum, masih krusialnya konflik antara kelompok Islam dan nasionalis sekuler (ABRI/TNI dan pemerintah/priyayi atau abangan) yang basis kulturalnya adalah Jawa sangat representatif untuk dijadikan contoh. Dan ini sudah menjadi asumsi umum terutama di kalangan para *Indonesianis*.²⁶

Adapun karakteristik pemerintah Orde Baru adalah bersifat otoriter atau dalam bahasa Affan Gaffar *autoritarian*. Terutama sekali dalam rangka membentuk format politik yang baru ketika masa transisi Orde Lama ke Orde Baru, sehingga dengan demikian pada hakikatnya Negara Orde Baru adalah *Beanststat* yang pada akhirnya melahirkan *autotarian politics* itulah sebabnya orde baru banyak dikuasai Priyayi dan birokrasi militer yang selalu mengambil langkah-langkah represif atau quasi represif.²⁷

Selain dari ketiga sisi di atas rasanya kurang lengkap dalam membahas Orde Baru kalau tidak dibahas peran determinan Soeharto, karena ini merupakan variable terpenting dalam sistem kekuasaan Orde Baru. Signifikansi kekuasaan Orde Baru ini terbukti memerintah selama dua setengah Dasawarsa terakhir Orde Baru.

Pada awal kemunculan Soeharto ke pentas kepemimpinan Orde Baru di akhir tahun 1990-an, ia nyaris tidak ada yang memperhitungkan. Namun setelah satu dasawarsa memerintah Soeharto telah mengubah *image* itu dengan cepat, ia menghimpun hegemoninya secara bermakna dan menjadi sokoguru atau proto tipe dari proses ekonomi politik Orde Baru. Perjalanan kepemimpinan Soeharto dari tak diperhitungkan menjadi faktor terpenting digambarkan oleh Eep ke-dalam empat babak, yakni :

²⁶ Saeful Mujani, “Politik Indonesia 1990-an Kebangkitan Ideologi”, dalam *Studi Islamika*, Vol. 3, 1996.

²⁷ Saeful Mujani, “Politik Indonesia 1990-an Kebangkitan Ideologi”, dalam *Studi Islamika*, Vol. 3, 1996, 25.

Pertama, dimulai dari kemunculan Soeharto sebagai tokoh terpenting dalam penumpasan Gerakan PKI September 1965 hingga episode Malari (malapetaka 15 Januari 1974). Dalam babak ini Soeharto adalah tokoh yang kurang dikenal dan kurang diperhitungkan.

Kedua, yaitu masa rekonsiliasi Orde Baru, pada babak ini Soeharto mulai menyeleksi kembali secara ketat penghuni kekuasaan di sekitarnya, sambil menegaskan bahwa proses politik berada dibawah pengendaliannya secara penuh. Pada episode ini adalah episode masa transisi Soeharto. Sebab ia yang semula terkolektifkan ke dalam kekuatan politik militer mulai menentukan kemandiriannya sebagai kekuatan politik Independen. Ini ia buktikan ketika ia terpilih menjadi ketua Dewan penasehat Golkar, semenjak itulah terkumpul tiga sumber kekuasaan pada diri Soeharto (Mandataris MPR, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, dan Ketua Dewan Penasehat Golkar).²⁸

E. Dakwah dan Politik Orde Baru

Keterkaitan antara dakwah (agama) dan politik tidak ada korelasinya, dan kalau delaborasikan kedalam suatu wacana (*discourse*) tentu juga tidak akan menarik dan tidak akan populer. Bahkan dilihat dari interpretasi serta tujuan keduanya menunjukkan garis singgung yang berlawanan. Dalam hal ini keterkaitan dakwah atau katakanlah agama dengan politik melahirkan dua aliran yang berbeda, aliran pertama mengklaim adanya penyatuan antara dakwah (agama) dengan politik, aliran lainnya mengklaim ada pemisahan antara agama dan politik. Klaim pertama mempresentasikan pemikiran Kristen, dan klaim kedua mempresentasikan pemikiran Islam.

Pemisahan antara agama dan politik menurut Maliki telah terjadi di Barat setelah adanya reformasi yang dipelopori oleh Paus Gregory VII pada tahun 1021-1085. Didalam proses reformasi itu secara substansial memisahkan gereja dari kekuasaan. Pada tahun 1089 secara resmi Amerikapun memasukan semangat politik tersebut kedalam konstitusi mereka. Pemisahan antara agama dengan politik yang berakar dari paham sekularisme menurut Casanova mengimplikasikan tiga jenis makna sekularisasi yakni :

²⁸ Eep Saefullah Fatah, *Zaman Kesempatan: Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru* (Bandung: Mizan, 2000), 192

Pertama sekularisasi bermakna diferensiasi yang memisahkan agama dengan politik, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan. *Kedua* sekulerisasi sebagai representasi merosotnya keyakinan agama, sehingga agama kehilangan otoritasnya. *Ketiga* sekulerisasi bermakna privatisasi yang mempostulatkan bahwa agama ditempatkan pada posisi marginal dari kekuasaan ataupun proses modernisasi.

Dalam pandangan Islam sendiri terdapat dua aliran yang berbeda yaitu aliran formalitas yang di anut oleh Sayid Kutub dan al-Maududi mengklaim tidak ada pemisahan antara agama dengan politik, sementara Muhammad Iqbal, memisahkan agama dari politik, tetapi bukan dalam arti ide melainkan dalam pemisahan fungsinya. Karena itulah menurut Bachtiar, umat Islam menjadikan agama sebagai alat Ilahiah untuk memaknai dunia, jadi Islam merupakan totalitas integral yang menawarkan solusi bagi semua persoalan kehidupan termasuk politik.²⁹

Ajaran agama *amar ma'ruf nahi munkar*, lebih populernya dakwah merupakan bukti tidak adanya pemisahan antara agama dengan politik, karena dakwah itu sendiri menurut M. Natsir tidak hanya bertumpu pada orientasi akhirat namun juga menyangkut semua sendi kehidupan di dunia termasuk di dalamnya politik.³⁰

Keterkaitan antar agama atau dakwah dan politik terutama politik Orde Baru, sangat menarik untuk dikaji, sebab Orde Baru sendiri adalah penganut faham Machivelli yang memisahkan antara agama dan politik, ini bisa terlihat dalam kebijakan Orde Baru yaitu penghapusan otoritas agama (*religion decline*) dari hal-hal yang berbau politik. Dan ini sudah menjadi asumsi umum agama pada masa ini dibatasi ruang geraknya sehingga agama tidak dijadikan identitas politik atau tujuan politik, salah satu contohnya adalah ditiadakannya politik aliran dengan fungsi partai politik pada tahun 1973.

²⁹ Bachtiar Efendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998).

³⁰ Bachtiar Efendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 143.

Agama (dakwah) oleh pemerintah Orde Baru dianggap akan mengancam instabilitas politik, karena itu perlu disingkirkan. Elit politik atau umat Islam yang menggunakan simbol agama untuk melawan *hegemoni* penguasa selalu dituding sebagai ekstrim kanan, sehingga aktivis Islam atau para dai tersebut mengalami alienasi politik atau stigma politik dalam bahasa Nurcholish.³¹

Sejak awal kemunculan Orde Baru, tidak sedikitpun memberikan ruang gerak kepada Islam politik, ini dimulai dengan tidak disetujuinya rehabilitasi kepada partai Masyumi sampai pada fungsi atau penggabungan partai-partai Islam kedalam PPP, dan terakhir pemberlakuan asas tunggal kepada semua organisasi.

Padahal ketika Orde Baru berdiri, peranan umat Islam atau dakwah dikondisikan untuk menentang komunis dan ini berakhir dengan kelahiran Orde Baru, disinilah umat Islam menaruh harapan-harapan besar terhadap rezim baru itu, wajar kalau seandainya umat Islam menuntut rehabilitasi terhadap partai Islam (*masyumi*) namun apa yang terjadi harapan-harapan itu hanya bersifat *utopis* karena rezim Orde Baru tidak menggubris tuntutan umat Islam.

Lebih-lebih ketika di era 1980-an pada masa di berlakukannya asas tunggal Pancasila bagi semua organisasi sosial-politik, maka peluang untuk membangkitkan kembali “Islam politik” secara ideologi menjadi tertutup rapat. Bagi kelompok Islam yang memandang politik sebagai panglima perjuangan ternyata sudah di pangkas oleh politik Orde Baru, serta menutup artikulasi dan peluang umat Islam tampil ke panggung politik nasional.

Pada situasi dan kondisi seperti itu, reaksi kekecewaan dari kalangan kaum Muslim menjadi meningkat, mereka beranggapan keharusan penerimaan asas tunggal ini berarti meniadakan asas ciri yang menjadi identitas dan simbol ideologi organisasi politik dan organisasi massa. Lebih-lebih dikalangan umat Islam kebijakan politik Orde Baru menjadi “*opensif ideologi*.”³²

³¹ Nurcholish Madjid, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern* (Jakarta: Paramadina, 1997).

³² M. Syafii Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995).

Melihat realitas seperti itulah dakwah tampil sebagai alternatif berpolitik, Islam tidak di tampilkan pada arena panggung politik untuk merebut kekuasaan, dan untuk menyalurkan politik umat Islam, maka dakwah menjadi salah satu cara atau metode untuk penyaluran politik umat Islam. Karena dakwah itu sendiri menurut Din Syamsuddin, secara substansial juga mengandung muatan politis yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*.³³

Situasi seperti itu tentunya membawa beberapa konsekuensi, di antaranya dakwah di anggap sebagai kekuatan yang dapat mengancam keberlangsungan bernegara, anggapan seperti ini merupakan warisan dari pemerintah Orde Lama, lebih-lebih warisan kolonial Belanda, yang selalu melihat dakwah sebagai upaya untuk menghimpun kekuatan dalam melawan pemerintah Orde Baru.

Dimana pemerintah selalu melihat dakwah sebagai propaganda alih-alih dai dicap sebagai teroris yang menentang penguasa, maka tak heran kalau dizaman Orde Barupun para dai banyak berhadapan dengan pengadilan karena di anggap telah melakukan subversi.

Sejak awal 1970-an pemerintah Orde Baru merancang suatu tatanan ekonomi politik atau yang lebih dikenal depolitisasi-politik, dalam perspektif kalangan Islam depolitisasi Islam. Dengan adanya kebijakan itu Islam menjadi termarjinalkan sehingga ini menyebabkan berdirinya dominasi kekuasaan Orde Baru yang *hegomonik*. Rekayasa politik seperti itu menurut Bachtiar akan berakibat politik dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaan. Di era inilah kegiatan-kegiatan keagamaan selalu dicurigai dan direspon negatif.³⁴

Hal ini disebabkan karena obsesi pemerintah yaitu membangun dalam suasana tertib politik, dan inipun diimplementasikan kedalam strategi maksimalisasi produktivitas ekonomi dan minimalisasi konflik politik, sehingga yang disaksikan dalam pemerintah Orde Baru tidak ada oposisi alternatif sebagai *chek and balance* terhadap pemerintah, dan ini menyebabkan pemerintah berlaku otoriter dan cenderung diktator.

³³ M. Din Syamsuddin, "The Muhammadiyah Dakwah and Allocative in The New Order Indonesia", dalam, *Studi Islamika* Vol. 2 1995, 35.

³⁴ Bachtiar Efendi, *Repolitisasi Islam* (Bandung: Mizan, 2000), 17.

Pada tahun 1980 pemerintah sangat intens melakukan “Ofensif Idiologi” yang berdampak luas terhadap kekuatan politik Islam. Sementara pemerintah meragukan kesetiaan Islam terhadap Pancasila. Hal ini terutama setelah terjadinya rentetan kejadian-kejadian pada masa-masa awal 1980-an diantaranya kejadian Tanjung Periuk, GPK Lampung, Haur Koneng, Aceh dan sebagainya, yang dinilai mengganggu stabilitas dan mengancam eksistensi negara nasional yang berdasarkan pada Pancasila.

Pada masa Orde Baru ini pula banyak gerakan atau organisasi yang pada masa Orde Lama menjadi organisasi politik beralih fungsi menjadi gerakan dakwah seperti halnya *nahdatul ulama* yang menyatakan kembali kepada khitahnya, *persis*, *perti*, dan *jamiatul wasilah*. Dan ini membawa dampak bagi kemajuan dakwah itu sendiri.

F. Perkembangan Dakwah Pada Masa Orde Baru

Kembalinya Islam kultural dari Islam politik dimasa Orde Baru ini membawa angin segar bagi perkembangan dakwah, betapa tidak dari semenjak pasca kemerdekaan dan masa transisi demokrasi dipimpin ke Orde Baru umat Islam larut kedalam eporia politik, tidak ketinggalan para dai yang seharusnya memfokuskan diri mereka pada kegiatan dakwah mereka malah melupakan hal itu, ini menyebabkan dakwah mengalami kefakuman. Keadaan itu terulang kembali ke jaman sekarang dimana para dai lupa akan kewajiban berdakwah malahan mereka senang berpolitik.

Di era Orde Baru, Islam politik seolah-olah dipetisikan, dan terkooptasi serta dikubur dalam-dalam. Dalam kondisi seperti itulah meminjam istilah Azyumardi, terjadi reoritasi para aktifis Islam (*da'i*) dari “Islam politik” ke “Islam kultural”, dan ini menyebabkan para aktivis muslim memfokuskan diri dalam kegiatan pendidikan dan dakwah sehingga dakwah pada masa Orde Baru mengalami perkembangan.³⁵

Perkembangan ini sangat relevan dengan situasi serta kondisi pada masa Orde Baru dimana dakwah diarahkan tidak hanya pada lapisan bawah grass root namun dakwah pun sudah mulai berekspansi kekalangan atas *white collour jobs* dan ini melahirkan apa yang disebut Azra.

³⁵ Azyumardi Azra, *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan* (Jakarta: PT. Rajawali Press 1999).

Guru-guru atau ustadz seperti Kosim Nurseha, Fenomena inipun digambarkan oleh Kuntowijoyo terjadi *trend* pada kalangan mahasiswa, seperti HMI, PMII, IMM, dan sebagainya ini menurutnya telah menghapuskan *gap* antara anak-anak dari kalangan, priyayi dan abangan seperti trikonominya Gertsz.³⁶

Pada lapisan bawah menyaksikan *trend* kebangkitan *mubaligh-mubaligh* populer, seperti Zaenuddin Mz. Daya tarik *mubaligh grass root* ini terletak pada pengungkapan yang mudah dicerna, disertai banyolan dan kritikan yang ini jelas merefleksikan gejala gerakan dakwah pada masyarakat kelas bawah.

Dikalangan pemerintah sendiri, dakwah telah digunakan sebagai media untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah melalui para dai, selalu menyampaikan pesan yang baik untuk pemerintah. Kepercayaan pemerintah terhadap dai itu sendiri menjadikan program dai dengan nama gerakan seribu dai yang disponsori oleh MUI, kegiatan ini diprioritaskan pada masyarakat transmigran.

Berbagai organisasi dakwah seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Perti, Jamiyatul Wasiliyah masih terus mengembangkan dakwahnya, begitu juga dikalangan pelajar dan mahasiswa, dari daerah perkotaan sampai pelosok desa dakwah berkembang pesat. Perkembangan dakwah di dua dekade terakhir di gambarkan oleh Kuntowijoyo, ditandai dengan maraknya kampus-kampus sebagai pusat dakwah. Di hampir setiap kampus, seperti di Bandung, Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Semarang dan sebagainya, mungkin ini menurut Kunto sebagai alternatif diberlakukannya pembungkaman kegiatan politik mahasiswa. Diluar kampus-kampus itu, masjid-masjid perkotaan menjadi pusat-pusat lain dari kegiatan keagamaan.

Selain dari itu yang lebih menarik mencermati perkembangan dakwah pada masa ini adalah ditandai dengan kemajuan majelis taklim dimana majelis taklim pada era 1970-an tidak hanya sebab tempat kelangsungan dakwah akan tetapi alih-alih menjadi unit-unit sosial, sehingga majelis taklimpun berhimpun dalam organisasi bernama Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) yang memiliki jaringan sampai ke tingkat kecamatan.

³⁶ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1998).

Kemudian kitapun menyaksikan perkembangan dakwah di desa masa Orde Baru ini adalah munculnya fenomena gerakan dakwah yang meniru gaya luar al-Ikhwanul Muslimin dari Mesir, dan munculnya gerakan dakwah seperti Darul Arqam, begitu juga gaya dakwah *usrah* yang memiliki metode dakwah yang berbeda dengan yang lainnya. Organisasi-organisasi ini bukan hanya sekedar kelompok studi dan ibadat, namun juga gerakannya selalu mendapat kecurigaan dari pemerintah sehingga mereka pun di bubarkan, seperti halnya Darul Arqam yang sampai sekarang masih dilarang di Indonesia.

Dalam perkembangan dakwah ini pemerintah Orde Barupun mempunyai peranan penting, pemerintah melalui Departemen Agama Memiliki jaringan-jaringan dakwah hingga ke-desa-desa. Di pemerintah desa sendiri terdapat seksi agama semiformal yang disebut (P2A) yang bertujuan mengurus masalah-masalah ke-agamaan. Pada tahun 1970-an pemerintah mensponsori didirikannya Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan MUI itu sendiri merupakan badan semi-pemerintah yang fungsinya sebagai badan konsultatif untuk pemerintah serta penghubung antara umat dan pemerintah.

Akhir diera 1990-an seiring dengan didirikannya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini secara tidak langsung memberikan respon positif umat Islam terhadap pemerintah. Kelahiran ICMI itu sendiri disatu sisi diklaim sebagai alat legitimasi penguasa dan disisi lain kelahiran ICMI paling tidak telah meminimalisir *image negatif* terhadap pemerintah. Seperti menurut kang Jalal, kelahiran ICMI telah melahirkan beberapa komentar yaitu diantaranya ICMI telah melahirkan primordialisme eksklusivisme dikalangan cendekiawan atau ICMI merupakan rekayasa politik untuk menyambut pemilu 1992 karena memang ICMI lahir menjelang pemilu.

Dalam kelahiran ICMI ini Nurcholis Madjid memiliki hipotesis yang Kang Jalal sebut “boom“ hipotesis ini menjelaskan apa saja yang berhubungan dengan fenomena Islam di Indonesia sejak munculnya mushala-mushala di kantor-kantor sampai kelahiran ICMI. Pada awal tahun 1990-an anak-anak kaum santri masuk universitas. Tujuh tahun kemudian terjadi “boom“ sarjana terdidik dari latar belakang budaya santri.

Hipotesis ini tentunya sangat optimistis, kelahiran ICMI akan menentukan sejarah umat Islam Indonesia pada masa yang akan datang. Secara perlahan-lahan umat Islam akan mewarnai berbagai pengambilan keputusan, ICMI akan menjadi *platform-mimbar* para cendekiawan Muslim.

Berbeda dengan Kang Jalal dan juga Nurcholis Madjid, Liddle dalam tesisnya yang sekaligus menentang tesisnya Hefner. Ia menulis : “*its infortant no to make too much of ICMI, or indeed of Soeharto’s orther recent gesturest toward Islam. His basic posture of opposition to antonoumous and powerfull Moslim parties not to mention and Islamic state, is unalttored the point is rather that as his power diminishes with age, he is looking around for support out side his principle base in the armed forces, and finding at rather, easily in the santri community*”.³⁷

Dalam hal ini Liddle menampilkan ketidak percayaannya pada hal-hal : *pertama*, lahirnya ICMI sebagai bukti adanya proses Islamisasi di kalangan abangan, baik pada tataran masyarakat maupun aparat birokrasi. *Kedua*, ia juga tidak percaya atau menaruh perasaan pesimitis pada kebangkitan politik santri sedang mengalami pertumbuhan yang mengancam politik kaum abangan. *Ketiga*, ia tidak percaya bahwa dalam pertumbuhan Islam ada peran dinamika politik masyarakat. Kelahiran ICMI bagi Liddle adalah sebuah faksi baru dalam birokrasi Negara.

Terlepas dari polemik tentang kelahiran dan kiprah ICMI di atas, kelahiran ICMI paling tidak adalah merupakan suatu kemajuan dalam bidang dakwah Islam, karena memang dilihat dari beberapa kegiatannya tidak sedikit bergerak dalam bidang dakwah, ini terbukti dengan penyaluran dai-dai keseluruh daerah transmigrasi.

Dakwah yang dikembangkan ICMI lebih berorientasi kepada pendekatan dakwah *bil hal* yaitu dakwah yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan umat, dan pembangunan mental spiritual, yang mengarah kepada peningkatan ilmu pengetahuan serta peningkatan iman dan taqwa.

³⁷ R. William Liddle, *Religion as Apolitical Resource in a Authoritarian Regime: ICMI and Future of Islamic Politic’s in Indonesia*, Makalah dalam seminar LIPI, AMINEF dan IAIN Jakarta, 1995.

Perkemangan dakwah pada masa Orde Baru sebagaimana digambarkan di atas ternyata dakwah tidak mengalami kebangkrutan walaupun pada kondisi atau dalam situasi modernisasi sebagaimana yang digalakkan oleh pemerintah Orde Baru. Dan ini menepis teori-teori yang dikemukakan seperti oleh E. Smith, Robert Bellah dan Harley Cox yang beranggapan bahwa agama akan mengalami kebangkrutan dan mengalami alienasi sebagai konsekuensi dari modernisasi.

Ini mungkin disebabkan karena para aktivis Islam atau sebut saja dai memfokuskan perhatiannya secara intens terhadap kemajuan dakwah, dimana mereka dalam situasi dan kondisi itu kembali kepada kulturnya sebagai penegak *amar ma'ruf nahyi munkar*, dan tidak melibatkan atau tidak memanfaatkan simbol agama sebagai alat berpolitik.

Dakwah dalam politik Orde Baru yang lebih dikenal dengan politik belah bambunya, ini menunjukkan sikap ambivalen terhadap para dai, disatu sisi pemerintah banyak mengakomodir para dai yang memiliki visi berbeda. Dengan kebijakan seperti itulah banyak kalangan dai yang tidak terakomodasikan aspirasinya sering menjadi oposisi alternatif.

Fenomena itulah yang selalu dihadapi para aktifis dakwah, terutama mereka yang memakai dakwah sebagai lokomotif berpolitik, yang menjadikan dakwah sebagai sarana untuk mencari kekuasaan dan mencari pamor di masyarakat. Namun dengan demikian dakwah memperlihatkan perkembangan yang signifikan pada masa Orde Baru ini.

G. Tantangan dan Hambatan Dakwah Pada Masa Orde Baru

Dalam kesadaran bahwa masyarakat Indonesia sedang membangun terutama pada masa Orde Baru, seiring dengan modernisasi, industrilisasi, dan developmentalisme, dimana masyarakat Indonesia, sedang dibawa beranjak dari tahap agraris-tradisional menuju *urban-industri*. Maka dakwah pun dihadapkan pada tantangan dan kemajuan itu.

Sehingga pada prinsipnya tantangan dan hambatan dakwah di zaman Orde Baru ini menurut berasal dari dua faktor, yang pertama tantangan yang datangnya dari dalam (*internal*) dan tantangan yang datangnya dari luar (*eksternal*).

1) Tantangan dari Dalam (*Intern*)

Dalam hal ini adalah menyangkut profesionalisme para dai yang *nota bene* penegak *amar ma'ruf nahi munkar*, oleh sebab itu keberhasilan dakwah berada di tangan para dai itu sendiri, kalau para dai mengemban misinya dengan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*), maka dakwahpun akan menuai keberhasilan, dizaman Orde Baru tidak jarang melihat para dai hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa melihat kondisi umat Islam, oleh karena itu para ulama (*da'i*) selalu dimanfaatkan oleh kepentingan penguasa, dan tanpa sadar mereka menurut Komarudin Hidayat telah dijadikan tameng atau bempir kekuasaan Orde Baru walaupun penguasa itu telah *zhalim*.

Karena itu al-Ghazali, mengklasifikasikan ulama kedalam dua bagian yaitu ulama dunia atau yang dikenal dengan ulama dunia dan ulama akhirat. Menurut al-Ghazali ulama yang baik adalah ulama yang tidak beminat mendatangi para penguasa atau pemerintah atau birokrasi selama ada celah untuk menghindarinya. Mereka senantiasa memelihara diri dari kemungkinan dampak yang muncul akibat hubungan tersebut.

Dalam sebuah hadits disebutkan "*ulama paling buruk adalah ulama yang suka mengunjungi penguasa sementara penguasa yang paling baik adalah penguasa yang sering mengunjungi ulama*". Dalam hadits lain disebutkan, kaum ulama adalah para pemegang amanat Rasul untuk disampaikan kepada hamba-hamba Allah selagi mereka tidak bergaul dengan para penguasa.

Apabila mereka telah menjalin hubungan dengan para penguasa, berarti mereka telah berhianat kepada Rasulnya. Oleh karena itu berhati-hatilah kamu kepada mereka dan jauhilah mereka.

Setiap juru dakwah harus betul-betul memahami, mengerti, menguasai, dan dapat mengembalikan makna dakwah kepada substansinya. Tidak sedikit para dai yang mengerti makna dakwah akan tetapi tidak mengetahui esensi dari dakwah itu sehingga apa yang dilakukan selama ini belum menyentuh esensi dakwah itu sendiri.

Para dai atau ulama ini harus mampu menjadi oposan dan harus berani mengkritik pemerintah walaupun yang sewenang-wenang, maka dengan begitu fungsi keulamaannya berjalan dengan apa yang diinginkan, apalagi pada masa Orde Baru penguasa telah membungkam para ulama yang kritis, sehingga ulama yang kritis selalu berurusan dengan aparat karena di anggap telah melanggar subversi, sehingga kondisi ini alih-alih menjadi konflik berkepanjangan antara ulama dan umaro. Fenomena seperti ini bukanlah hal yang aneh pada masa Orde Baru, gerakan-gerakan dakwah tak jarang selalu mendapat respon negatif dari pemerintah.

Tokoh dakwah yang selalu di curigai pada periode awal Orde Baru misalnya M. Natsir, sebagai mantan ketua Masyumi M. Natsir selalu di curigai dalam melakukan dakwah nya. Yang artinya ia mendirikan Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), sebagai sarana untuk berdakwah, melalui DDII ini M. Natsir aktifitas perjuangannya dengan memakai format dakwah, sikap kritisnya terhadap penguasa membuat hubungannya dengan penguasa menjadi tidak mesra.

Kritiknya yang tajam serta keberaniannya mengoreksi pemerintah Soeharto menyebabkan mengalami pencekalan ke luar negeri. Pencekalan inipun terus berlangsung tanpa ada proses hukum yang jelas, hingga ia meninggal dunia.

2) Tantangan dan Hambatan dari Luar (*Ekstern*)

Problem yang dihadapi dakwah pada masa Orde Baru juga adalah senantiasa berkaitan dengan hubungan yang sering kali tegang antara pemerintah dengan para dai. Masalah penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas menjadi masalah yang genting.

Problem lainnya adalah ketakutan yang dibayangkan dan ketakutan *riil* terhadap kaum Muslim “*ekstrim kanan*“ suatu istilah resmi yang dipakai pemerintah untuk mencerca kaum fundamentalisme.

Kasus komando Jihad yang terjadi tahun 1978-1981, atau kasus tanjung priok (1984) merupakan bukti bahwa penguasa tidak menginginkan kemajuan dakwah. Kegiatan-kegiatan dakwah selalu mendapat perhatian yang ketat dari komkamtib, ini terbukti kalau ada penceramah yang bertentangan dengan pemerintah akan berhadapan dengan aparat keamanan, dan selalu di anggap subversi. Oleh sebab itulah pemerintah mengeluarkan beberapa keputusan tentang aktivis dakwah, yang isinya mengatur dakwah tidak bertentangan dengan pemerintah peraturan-peraturan itu di antaranya :

Keputusan Menteri Agama No.44 Tahun 1978 tentang pelaksanaan dakwah agama dan kuliah subuh di radio, surat edaran Menteri Agama No. 3 tahun 1978 tentang dakwah dan kuliah subuh, keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 tentang pedoman penyiaran agama, semua keputusan pemerintah itu esensinya adalah melarang berdakwah yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD’45, menghambat pembangunan nasional, dan mengganggu stabilitas nasional.

Disamping secara terang-terangan, tantangan para dai yang terselubung adalah menghalangi dakwah dengan berbagai sarana. Aksi kontra dilancarkan melalui siaran radio, televise, surat kabar, majalah dan sebagainya. Para dai diberi kebebasan untuk mendakwahkan Islam tetapi setelah itu *mad’u* disuguhi lagi hal-hal yang melupakan dakwah.

H. Penutup

Perjalanan dakwah dalam konteks Indonesia selalu memperlihatkan tripikalnya (*ke-indonesiaan-nya*), Ini terbukti ketika dakwah masuk ke Indonesia, dakwah berkolaborasi dan mengalami akulturasi dengan budaya Indonesia. Ketika dakwah masuk ke Indonesia dakwahpun beradaptasi dengan kondisi dan keadaan tradisi setempat.

Misalnya ketika dakwah masuk atau berhadapan dengan budaya Jawa yang cenderung singkretik, penuh dengan mistik dan tradisi kejawaan maka dakwahpun beradaptasi dengan kebudayaan Jawa, maka terjadilah apa yang dinamakan Jawanisasi Islam, begitupun dengan fenomena budaya-budaya lainnya di Indonesia, seperti budaya Minang, Bugis, Sunda dan sebagainya, memperlihatkan adanya akulturasi budaya lokal dengan dakwah Islam.

Setelah melalui perjalanan waktu yang tidak begitu lama dakwahpun mulai merambah keseluruh pelosok Indonesia, ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu *pertama*, kelestarian dakwah Islam sehingga ini menyebabkan Islam dapat diterima dengan cepat, *kedua*, telah menghapuskan hierarki kelas atau konsep stratifikasi sosial seperti yang ada pada agama Hindu, *ketiga*, situasi dan kondisi politik pada awal kedatangan dakwah Islam sangat mendukung yaitu runtuhnya kerajaan terbesar yaitu Majapahit yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemajuan dakwah Islam.

Dakwah (*amar ma'ruf nahyi munkar*) secara substansial memiliki nilai-nilai politis, pada masa Orde Baru dijadikan sebagai alternatif Islam politik, dimana dalam kondisi umat Islam sedang mengalami stigma politik tidak ditampilkan secara praktis. Penyebab hal itu karena kebijakan politik Orde Baru menghapuskan politik aliran dengan pusi atau penggabungan politik Islam kepada PPP. Para aktivis Islam banyak yang memanfaatkan dakwah sebagai aspirasi berpolitik mereka.

Dalam kondisi seperti itu maka dakwah pun mengalami perkembangan yang signifikan hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, para aktivis Islam (*da'i*) melakukan reorientasi dari "Islam politik" ke "Islam kultural". *Kedua*, banyak organisasi-organisasi politik kembali kepada misinya semula yaitu memajukan dakwah, seperti NU, Muhammadiyah, PERTI, Persis, dan lain-lain. *Ketiga*, pemerintah sendiri memberikan respon positif terhadap keberlangsungan dakwah.

Perkembangan dakwah pada masa Orde Baru tidak hanya terjadi pada masyarakat lapisan bawah (*grass root*), akan tetapi dakwah mampu berekspansi ke kalangan atas (*birokrasi*). Kegiatan-kegiatan dakwah terlihat di mushala-mushala, majelis taklim, kampus-kampus sampai di hotel-hotel. Ini menunjukkan bahwa dakwah sudah mendapatkan legitimasi atau mendapat tempat di masyarakat.

Dikalangan birokrasi sendiri sedang mengalami apa yang disebut Islamisasi organik, dimana keluarga-keluarga pejabat birokrasi sudah banyak tertarik kepada kegiatan-kegiatan ke agamaan. Tak heran kalau pada masa Orde Baru lahir penda'i-penda'i seperti Kosim Nurseha, Zainudin Mz, Nurcholis Madjid, Dawam Raharjo, Quraisy Shihab dan lain-lain.

Akan tetapi pemerintah Orde Baru yang dikenal dengan politik belah bambunya, dimana dalam kebijakan politik ini pemerintah disatu sisi mengakomodasi para dai yang memiliki kesamaan visi. Dan disisi lain pemerintah berlaku tidak *fair* atau tidak adil terhadap para dai yang memiliki perbedaan visi dengan pemerintah. Dan ini membawa kosekuensi sering terjadinya ketegangan antara pemerintah dengan umat Islam. Tak jarang pemerintah selalu mencurigai kegiatan-kegiatan dakwah, alih-alih dakwah dicap sebagai propaganda atau istilah Orde Baru sebagai “*ekstrim kanan*”.

Pemerintah Orde Baru banyak menjadikan dakwah sebagai alat legitimasi kekuasaan, sehingga pemerintah selalu memanfaatkan para dai sebagai tameng atau bumper dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan politiknya. Maka pemerintahpun mengeluarkan peraturan-peraturan atau undang-undang yang mengatur kegiatan dakwah seperti halnya, keputusan Menteri Agama No 44 tahun 1978, No 70 tahun 1978, dan edaran Menteri Agama No 3 tahun 1978, yang esensinya mengatur dakwah supaya tidak bertentangan dengan pemerintah.

Oleh karena itulah tantangan dakwah pada masa Orde Baru lebih banyak dari kebijakan pemerintah disamping dari dai itu sendiri, karena pengaruh politik Orde Baru terhadap keberlangsungan dakwah dan selalu membawa dakwah mengalami pasang surut.

Daftar Pustaka

- A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1981.
- Ambarry, Hasan Muarif, *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Anderson, Benedict, *Imagined Communities: Reflection on the Origin and the Spread of Nationalisms*, London: Verso, 1991.
- Anwar, M. Syafii, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Arnold, Thomas W., *Sejarah Dakwah Islam*, Jakarta: PT. Wijaya, 1981.
- Aziz, Jumu'ah Amin Abdul, *Fiqh Dakwah, Studi atas Berbagai Prinsip dan Kaidah yang Harus dijadikan Acuan dalam Dakwah Islam, terj. judul aslinya ad-Da'wah Qawaid wa Ushuul*, Solo: PT. Intermedia, 1997
- Azra, Azyumardi, *Agama Rakyat Agama Penguasa*, Yogyakarta: Galangpress, t.t.
- , *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan*, Jakarta: PT. Rajawali Press 1999.
- , *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Indonesia Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- , *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana Dan Kekuasaan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Beik, Irfan Syauqi, *Potensi Zakat Indonesia*, Republika Edisi Mei 2011.
- Benda, H. J., "The Structure of Southeast Asian History: Some Preliminary Observations", dalam *Journal of Southeast Asian History*, Vol. 3, No. 1, 1962.
- Chapra, Umer, *The Future of Economics an Islamic Persfektive*, Islmic Foundation, 2014.
- Cortesao, Armando, *The Suma Oriental Of Tome Pires: An Account Of The East From The Red Sea To Japan. Written In Malacca And India In 1512-1515*. Hakluyt society 1944, reprint 1967.
- Coulombis, Theodore A., H. Wolfe James. *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*, Bandung: Abardin, 1990.
- Cusker, J. Mc., Editor in Chief, *History of World Trade since 1450*, Thomson Gale, Macmillan America, 2006.

- Djaelani, Abdul Qadir, *Sekitar Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 1994.
- Faealy, Greg & Sally White, *Expressing Islam : religion life and politics in Indonesia* Singapore : ISEAS.
- Fathurahman, Oman, “Pengantar *Jawharat al-Ma’arif*; Mempertegas Identitas Islam Melayu”, dalam Hendri Chamber-Loir dkk. *Iman dan Diplomasi Serpihan Sejarah Kerajaan Bima,(KPG, Ecole Francaise D’extreme-Orient*, Jakarta: Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2010.
- Graaf, H. J. De, “South-East Asian Islam to the Eighteenth Century, dalam P.M. holf, et. Al. (ed), *Cambridge History of Islam*, London: The Cambridge University Press, 1970.
- Graaf, H.J de dan Th.G.th. Pigeaud, *Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa: Kajian Sejarah Politik Abad ke 15 dan 16*,
- Guillot, Claude, *The Sultanate of Banten*, Gramedia Book Publishing Division,1990.
- Hall, D.G.E., *Sejarah Asia Tenggara*, Surabaya: Usaha Nasional, 2000.
- Kamus Ilmiah Populer, Tim Prima Pena, Surabaya : Gitamedia Press, 2006.
- Kartodirdjo, Sartono, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III : Jaman Pertumbuhan Dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008.
- , *Pengantar Sejarah Indonesia baru:1500-1900 dari Emporium sampai Imperium*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1998/
- Laffan, Michael, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma below the Winds*, London and New ork: Routledge-Curzon, 2003.
- , *Sejarah Islam di Indonesia*, terj. Indi Aunullah & Rini Nurul Badariah, judul asli The Making of Indonesian Islam, Yogyakarta: Bentang, 2015.
- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Luth, Tohir, *M. Natsir: Dakwah dan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Madjid, Nurcholish, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- , *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, Jakarta: Paramadina, 1999.

- , *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1977
- Milner, A.C. *The Invention Of Politics In Colonial Malaya: Contesting Nationalism And The Expansion Of Public Sphere*, Cambridge: Cambridge University press, 1995.
- Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009.
- Nazeer, M., *Islam in Global History: Volume One: From the Death of prophet*. 391.
- Pelras, Christian, *Religion, Tradition and The Dynamics os Islamization in South Sulawesi*”, Archipel, 29, I, 1985.
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj.: *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, Jakarta : Robbani Press, 2001.
- Raharjo, M. Dawam, *Intelektual, Intelegensi dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung: Mizan 1996.
- Reid, Antonie, *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680*, terj., *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680: The Lands Below the Winds*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- , *Menuju Sejarah Sumatra; Antara Indonesia Dan Dunia*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-1800*, Jakarta: Serambi, 2008.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan, 1998.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sudewo, Eri, *Manajemen Zakat, tinggalkan lima belas tradisi ambil 4 tradisi*, Jakarta : IMZ, 2005),
- Tjandrasasmita, Uka, “al-Sabakah al-Tijariyyah li al-Sulthanah al-Indunisiyyah fi Qarn 15-17”, *Studi Islamika*, vol.19, no 3, 2003.
- , *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-kota Muslim di Indonesia dari Abad XII sampai XVIII Masehi*, Kudus: PT. Menara Kusud, 2000.
- Wade, Geoff, “An Early Age of Commerce in Southeast Asia, 900-1300 CE”, dalam, *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 40, No. 2, 2009.
- Wineburg, Sam, *Berfikir Historis; Memetakan Masa Depan, Mengajarkan Masa Lalu*, terj. Masri Maris, judul asli *Historical Thinking and Other Unnatural Acts: Charting the Future of Teaching the Past*, Jakarta: Yayasan Obor: 2006.